

PERAN NUKLIR KOREA UTARA SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI POLITIK INTERNASIONAL

Oleh: Andi Purwono¹ dan Ahmad Saifuddin Zuhri²

Abstraksi

Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia atas pengembangan program nuklirnya. Setelah mengambil langkah swasembada pangan dan nasionalisasi seluruh lahan dan industri, Korea Utara mengembangkan industri nuklir sebagai upaya memodernisasi persenjataan militernya. Korea Utara telah menjadikan nuklir sebagai instrumen diplomasi terhadap dunia internasional demi meraih kepentingan nasionalnya. Alasan Korea Utara menggunakan nuklir sebagai alat diplomasi adalah *pertama*, alasan *rejim survive*. Korea Utara menganggap efek *deterrent* kepemilikan kemampuan serang nuklir akan menggaransi kelangsungan hidup rejim Pyongyang yang tidak lain adalah rejim komunis yang masih ingin eksis di belahan bumi.

Kedua, alasan ekonomi. Korut menggunakan program nuklirnya sebagai instrumen diplomasi untuk mendapat bantuan ekonomi. Adapun konsesi yang diberikan Korea Utara adalah seperti penghentian sementara program nuklirnya atau ijin inspeksi IAEA dilakukan dengan imbalan bantuan makanan dan bahan bakar dari Cina dan Korea Selatan, serta pembangunan reaktor nuklir sipil di Korea Utara oleh pihak Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara bahkan meminta konsesi untuk sekedar hadir di meja perundingan, sebagaimana syarat Pyongyang agar Washington mencairkan rekening 25 juta dollar miliknya yang dibekukan di Makau tahun 2005 sebelum kembali ke meja perundingan.

Ketiga, alasan keamanan. Bagi Korea Utara, program nuklirnya merupakan cara diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat mengarah pada langkah negosiasi. Meskipun pada awalnya, tujuan penegembangan reaktor nuklir di Korea Utara ditujukan untuk penelitian. Namun seiring dengan berkembangnya dinamika politik internasional, Korea Utara pun menggunakan teknologi nuklir yang dimilikinya sebagai sebuah bentuk diplomasi koersif dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnyawilayah dan keberadaan NKRI.

Kata kunci: Nuklir, Diplomasi, Politik Internasional

¹ Dosen HI FISIP Unwahas

² Mahasiswa HI FISIP Unwahas

A. Latar Belakang Masalah

Korea Utara kembali menjadi fokus perhatian Internasional dengan program nuklirnya. Untuk membatalkan program tersebut, Amerika Serikat bersama dengan Jepang, Korea Selatan dan Cina berupaya untuk membujuk Korea Utara agar segera menghentikan keberlanjutan program nuklirnya. Program nuklir ini dinilai akan berdampak pada munculnya bencana besar seperti kelaparan, kesengsaraan dan kematian. Di samping membahayakan bagi lingkungan, kesehatan dan kehidupan manusia, nampaknya program nuklir ini juga berpengaruh pada terjadinya kemerosotan ekonomi di sebagian negara kawasan seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea Selatan serta beberapa negara lainnya. Muncul juga kekhawatiran dunia internasional akan terjadinya bahaya peristiwa perlombaan senjata.

Kemerosotan Korea Utara terjadi sejak tahun 1990-an dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama bilateral dengan mitra dagang utamanya, yaitu USSR serta munculnya pengaruh dari Eropa Timur yang mengkombinasikan peristiwa kelaparan akibat dari terjadinya peristiwa bencana banjir yang

terjadi secara berturut-turut pada tahun 1996, 1997, dan 2000 di Korea Utara. Sejalan dengan lemahnya perekonomian negaranya, dalam bidang militer Korea Utara memiliki 1,08 juta personil militer atau sekitar 44% dari total populasi. Korea Utara juga telah menghabiskan 20–25 % total GNP (*Gross National Product*) negara dalam pengembangan program senjata nuklirnya. Pada awal tahun 1994 Korea Utara memproduksi plutonium untuk pembuatan 2 senjata nuklir, sedangkan hingga sampai saat ini diperkirakan telah memproduksi 5–7 senjata nuklir dengan berbagai tipe. Adapun salah satunya adalah (CNN) yakni rudal yang mempunyai hulu ledaknya paling tinggi.

Pengembangan senjata nuklir Korea Utara memberikan efek negatif pada kepentingan ekonomi negara–negara Seperti Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan bahkan Korea Selatan. Hal ini di sebabkan karena banyaknya pelaku usaha yang membatalkan investasinya dikawasan

Asia Timur dengan alasan keamanan³. Dalam konteks politik internasional, kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara memang menjadikan perubahan, terutama rawan konflik. Mengingat karena senjata tersebut memiliki nilai tawar yang sangat tinggi, maka nuklir dapat dijadikan sebagai suatu instrumen kekuasaan negara yang optimal saat ini. Sayangnya keberadaan nuklir dapat memunculkan permasalahan ketegangan baru di berbagai belahan dunia termasuk seperti yang terjadi di Asia Timur.

Dalam bidang persenjataan, Korea Utara juga telah berhasil mengembangkan misil dengan jarak jangkauan menengah dan tinggi seperti Taepodong-1 yang memiliki daya jangkauan 1.500–2.500 Km, dan memiliki hulu ledak 1.000 kg–1.500 kg. Jenis Taepodong-I ini digunakan untuk mengorbitkan satelit utama Korea Utara, dan telah diluncurkan pada tanggal 31 Agustus 1998. Sedangkan rudal Taepodong-II yang diluncurkan pada 6 Agustus 2003 memiliki daya jelajah 4.400 km sampai 6.700 km diperkirakan mampu menjangkau Amerika Serikat (Alaska), India, Pakistan, serta seluruh wilayah Indonesia.

³ Markus Noland, *The Economic Implications of a North Korea Nuclear Test*, Asian Policy, Washington D.C., 2006, hal. 25-39

Apabila misil–misil tersebut dilengkapi nuklir sebagai hulu ledaknya, maka bisa menjadi senjata pemusnah massal.

Pada tahun 2004 Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga setelah sebelumnya telah melakukan uji coba pada tahun 1993 dan 1998. Kini, di wilayah Hamgyong, Korea Utara kembali melakukan pengetesan Taepodoong-II yang memiliki daya ledak sekitar 15 kilo ton TNT. Senjata ini, secara sepiantas mendekati daya ledak bom Hiroshima pada tahun 1945. Maka, atas klaim keberhasilannya dalam melakukan uji coba nuklir tersebut, Korea Utara mendapat tekanan dari dunia Internasional untuk segera meninggalkan program persenjataan nuklirnya. Uji coba nuklir tersebut dinilai dapat mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan negara–negara Internasional. Oleh karena itu, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara–negara sekutunya dikawasan Asia Timur meminta kepada Dewan Keamanan (DK) PBB agar segera

menjatuhkan sanksi bagi Korea Utara⁴. Pyongyang juga didesak banyak pihak untuk ikut bergabung ke dalam kesepakatan Non-Proliferasi Nuklir (NPT)⁵ sebagai upaya program penghentian pengembang-biakan nuklir.

Atas berbagai desakan internasional, akhirnya Korea Utara masuk menjadi anggota NPT pada tanggal 12 Desember 1985. Tidak lama, setelah 18 bulan menjadi anggota Korea Utara kemudian berniat mengakhiri kesepakatan tersebut. Bagi Korea Utara, NPT dinilai tidak mampu melindungi keamanan dan pengakuan kedaulatan negaranya⁶. Atas sikap ini, akhirnya Korea Utara kembali mengalami banyak

tekanan dan reaksi keras dari dunia internasional atas pengembangan nuklirnya terutama sejak dilakukan uji coba nuklirnya pada tahun 2004. Meskipun demikian, reaksi dan tekanan internasional tidak menjadikan surut pada aksi nekatnya. Korea Utara beranggapan bahwa sebagai negara kecil yang memiliki banyak keterbatasan, ia membutuhkan suatu strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya, termasuk geliat untuk melakukan pengembangan nuklirnya.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya. Selain permasalahan-permasalahan yang terjadi di Semenanjung Korea sangat kompleks, bagi penulis, program pengembangan nuklir Korea Utara sangat penting bagi dunia perpolitikan internasional. Oleh sebab itu, penelitian pada skripsi ini penulis beri judul "Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Dalam Politik Internasional".

⁴ Sikap Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Kawasan Asia Timur dengan meminta PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) untuk segera menjatuhkan sanksi terhadap Pyongyang. AS dan sekutunya melihat bahwa Korea Utara telah melanggar pada bab tujuh Piagam PBB antara lain yang mengatur perihal ancaman terhadap ketenteraman serta tindakan untuk melakukan agresi. Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap Korea Utara berupa embargo ekonomi dan militer. *Lihat juga*, <http://www.jurnalhukum.blogspot.com>

⁵ NPT (*Non-Proliferasi Nuclear*) merupakan suatu kesepakatan yang berisi tentang pelarangan dalam pengembangbiakan serta kepemilikan senjata nuklir sebagai senjata pemusnah massal.

⁶ Paul Kerr, *Arms Control Association Fact Sheet: Cronology of U.S-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, Analysis*, Washington D.C., 2003

Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskannya menjadi: "Mengapa Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasi bagi kepentingan nasionalnya?"

Pembahasan

Seiring dengan perkembangan dan dinamika politik internasional, isu krisis nuklir Korea Utara telah berhembus sejak era 1990-an. Akan tetapi, pada saat itu dunia internasional masih belum memercayai isu tersebut. Korea Utara semakin mencengangkan dunia dengan mengeluarkan diri dari Perjanjian *Non-Proliferasi Nuclear (NPT)* pada tanggal 10 Januari 2003, dan pada tahun 2005 langsung mengklaim atas kepemilikan sejumlah senjata nuklir aktif yang tidak digunakan untuk kepentingan publik dan perdamaian akan tetapi untuk kepentingan militer.

Pada tanggal 9 Oktober 2006, Korea Utara dinyatakan telah berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya, yang diuji pada sebuah terowongan di pantai timur, dan ledakan yang terjadi menimbulkan gempa berkekuatan 4,2 Mb (*body wave magnitude*) yang langsung mendapatkan banyak protes dari negara tetangga terdekatnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Uji Coba ini dipandang mengancam stabilitas regional, melanggar kehendak DK-PBB (Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-

Bangsa) serta memukul usaha-usaha *non-proliferasi*. Pada saat itu, Korea telah mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional dan PBB, untuk segera menghentikan program nuklirnya dan secara damai kembali dalam NPT. Jika tidak, maka akan diadakan pada DK-PBB untuk ditindak lanjuti. Akhirnya, pada tahun 2008 Korea Utara telah menuruti apa yang diharapkan masyarakat internasional.

Meningkatnya ketegangan di Asia Timur saat ini hanyalah sebuah episode dari perjalanan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya sejak tahun 1970. Pada 5 April 2009 lalu, Korea Utara akhirnya meluncurkan roket dari Musudan-ri, sebuah fasilitas militer di pesisir timur Korea Utara. Klaim Korut bahwa peluncuran roket ini adalah misi penempatan satelit komunikasinya dianggap sebagai tipuan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Keduanya meyakini bahwa di balik alasan resmi tersebut Korea Utara berusaha menguji hasil pengembangan daya jangkau peluru kendalinya yang diperkirakan memiliki jangkauan hingga wilayah Alaska, sebagai bagian dari program senjata nuklir Korea Utara.

Pada Mei 2009, Korea Utara kembali meluncurkan rudal di atas negara Jepang yang diklaim sebagai rudal pengecek cuaca. Hal ini menjadi api kemarahan dunia internasional terhadap Korea Utara, karena dengan nyata telah menunjukkan adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negara lain. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar Korea Utara dijatuhkan sanksi berdasarkan Bab Tujuh dari Piagam PBB yang mengatur mengenai "ancaman terhadap ketentraman" dan "tindakan untuk melakukan agresi". Akhirnya, embargo yang terjadi pada Korea Utara yang berujung pada semakin diisolasi dari pergulatan bangsa-bangsa semakin gencar. Perwakilan Energi Atom International melaporkan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah mengancam rejim anti pengembangbiakan bahan nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius, tidak hanya pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional

Menanggapi aksi Korut tersebut, Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan pernyataan kecamananya dan menegaskan bahwa peluncuran roket Korut telah melanggar resolusi DK PBB nomor 1718. Tidak terima dengan kecaman Dewan Keamanan PBB tersebut, Korea Utara kembali mengancam akan meninggalkan perundingan enam

pihak (*Six-Party Talk*) dan kembali mengaktifkan reaktor nuklirnya di Yongbyon yang telah dimatikan sejak tahun 2007. Korea Utara bahkan bertindak lebih jauh lagi dengan mengusir tim inspeksi IAEA dari instalasi nuklirnya di Yongbyon⁷. Perkembangan ini merupakan sebuah *setback* yang signifikan bagi perundingan *Six-Party Talk*.

Alasan utama Korea Utara dalam mempertahankan nuklirnya adalah untuk melindungi keamanan negaranya terutama dari agresi militer Amerika Serikat yang dipandang sebagai ancaman. Maka, dengan cara diplomasi koersifnya ini pulalah, Korea Utara mengancam balik Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya. Korea Utara juga meyakini bahwa program nuklirnya adalah sarana (instrumen) diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat terhadap meja negosiasi(perundingan), maupun sebagai suatu alat penjamin keamanan rejimnya. Dalam proses negosiasi itu, Korea Utara memercayai bahwa selain menjaga keamanan rejimnya, program nuklir itu juga akan bisa mendapat keuntungan ekonomi seperti program

⁷ Harian *Republika*, edisi 14 April 2009

bantuan pangan, pendanaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Korea Utara mengejar program nuklir sebagai strategi inti agenda utama nasional. Dengan kata lain, Korea Utara menggunakan nuklir sebagai instrumen diplomasi dengan negara-negara "lawan" demi meraih kepentingan nasionalnya. Berikut adalah alasan-alasan nuklir Korea Utara sebagai instrumen diplomasi:

A. Alasan *Regim Survive*

Sekalipun perang Korea telah berakhir lebih dari lima dasawarsa lalu (1953), secara teknis perang Korea belum berakhir karena situasi perang Korea mereda setelah ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata dan bukannya sebuah perjanjian damai. Korea Utara masih merasa terancam dengan penempatan 27 ribu tentara Amerika Serikat di Korea Selatan, ditambah 47 ribu tentara Amerika Serikat lainnya di Jepang.

Korea Utara tidak akan melupakan bagaimana Cina pada dekade 1950-an mengalami tiga kali ancaman serangan nuklir dari Amerika Serikat. Ancaman serangan nuklir pertama dialami Cina karena bantuan militer Cina pada Korea Utara saat perang Korea. Dua ancaman lainnya dialami Cina berkaitan dengan konflik Cina-Taiwan tahun 1955 dan 1958. Akhirnya pada tahun 1964 Cina berhasil melakukan uji

ledak senjata nuklir dan membuat Amerika Serikat mengkaji ulang hubungannya dengan Cina. Delapan tahun kemudian (1972), presiden Amerika Serikat Richard Nixon melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing untuk melakukan normalisasi hubungan Amerika Serikat-Cina.

Selama masa pemerintahan Bush Junior⁸, Korea Utara dianggap sebagai bagian dari "Poros Kejahatan" (*Axis of Evil*) bersama Iran dan Irak. Dunia menyaksikan bagaimana dua negara berdaulat, Afghanistan dan Irak, diinvasi oleh Amerika Serikat. Pesan bagi Pyongyang sangat jelas; *pertama*, tidak ada hukum internasional yang bisa melindungi suatu negara dari aksi *super power* Amerika Serikat. *Kedua*, satu-satunya hal yang dapat menghalangi Amerika Serikat melakukan serangan adalah kepemilikan senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir sebagai *the ultimate weapons of mass destruction*. Korea Utara

⁸ Bush Junior adalah sebutan dari Presiden Amerika, George W. Bush.

menganggap efek *deterrent* kepemilikan kemampuan serang nuklir akan menggaransi kelangsungan hidup rejim Pyongyang. Selain itu, langkah Korea Utara dalam mempertahankan nuklirnya adalah untuk melindungi keamanan rejim komunisnya dari agresi militer Amerika Serikat yang dipandang sebagai ancaman. Maka, dengan cara diplomasi koersifnya ini pulalah, Korea Utara dapat mengancam balik Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya.

B. Alasan Ekonomi

Keberadaan nuklir Korea Utara dirasa telah mengancam eksistensi negara-negara internasional, khususnya Amerika Serikat terutama menyangkut hegemoninya di kawasan Asia Timur. Kepentingan perekonomian Amerika Serikat di Semenanjung Korea sedikitnya mengalami penurunan akibat dari dampak keberadaan nuklir Korea Utara. Hal itu juga dirasakan oleh negara-negara sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan Cina, yang merupakan negara relasi Korea Utara sendiri.

Sebelum mengembangkan nuklir, perekonomian Korea Utara memang telah melemah. Sepanjang tahun 1990-an, Korea Utara mengalami berbagai macam kesulitan dalam menyeimbangkan perekonomian negaranya, dan mengakibatkan masuk daftar

kategori negara miskin. Adapun kemiskinan itu ditopang oleh beberapa faktor seperti, semakin menurunnya perekonomian negara dengan hilangnya strategi perdagangan dengan negara kesatuan Soviet. Selain itu, faktor yang mendorong Korea Utara menjadi negara miskin adalah ketidakmampuannya Korea Utara dalam mengimpor barang-barang yang diperlukan untuk menampung industri negaranya, sehingga menyebabkan kemelesetan ekonomi⁹. Keterpurukan tersebut disusul dengan adanya pendidikan dan kesehatan yang rendah serta kurang memadahi, juga munculnya bencana banjir yang kemudian diikuti kemarau dasyat selama beberapa tahun. Fenomena tersebut bermula sejak tahun 1997, dan menjadi salah satu faktor pendukung melemahnya perekonomian Korea Utara¹⁰.

9

http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=44&tab=1, diakses pada 31 Maret 2010 pada pukul 23.28 WIB

10

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea#Birth_of_North_Korea, diakses

Rapuhnya perekonomian Korea Utara juga akibat dari lamanya proses penerimaan bantuan dari Organisasi Internasional (PBB), serta hutang luar negerinya yang tinggi, juga GNP (*Gross National Product*) yang semakin menurun. Faktor kemiskinan Korea Utara juga didukung atas kegagalannya Pyongyang dalam melakukan uji coba senjata kelimanya, yakni Taepodong II. Bersamaan dengan krisis nuklir, Pyongyang akhirnya mendapatkan tekanan dari negara-negara internasional terutama terkait pengembangan nuklirnya di wilayah Yongbyon. Saat ini Korea Utara telah berhasil mengembangkan beberapa macam senjata nuklir yang disinyalir telah mampu menandingi kecanggihan teknologi Amerika Serikat. Keberadaan senjata-senjata nuklir tersebut merupakan upaya keras dari pemerintah Korea Utara untuk membuktikan kepada rakyat dan dunia internasional bahwa sejalan dengan perekonomian negaranya yang lemah, Korea Utara ternyata masih mampu menciptakan persenjataan nuklirnya.

Korut menggunakan program nuklirnya sebagai instrumen diplomasi untuk "memeras" negara-negara di sekitarnya dalam hal memberikan

bantuan ekonomi. Adapun konsesi yang diberikan Korea Utara adalah seperti penghentian sementara program nuklirnya atau izin inspeksi IAEA dilakukan dengan imbalan bantuan makanan dan bahan bakar dari Cina dan Korea Selatan, serta pembangunan reaktor nuklir sipil di Korut oleh pihak Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara bahkan meminta konsesi untuk sekedar hadir di meja perundingan, sebagaimana syarat Pyongyang agar Washington mencairkan rekening 25 juta dollar miliknya yang dibekukan di Makau tahun 2005 sebelum kembali ke meja perundingan.

Di tahun 2003, Korea Utara juga pernah mengutarakan niatnya mengembangkan senjata nuklir agar menghemat pengeluaran bagi angkatan bersenjatanya. Dengan adanya *nuclear deterrent*, maka Pyongyang berharap dapat mengurangi jumlah tentaranya yang mencapai 1,1 juta orang dan mengalokasikan lebih banyak uang untuk ekonomi sipilnya.

C. Alasan Keamanan

pada 31 Maret 2010 pada pukul 23.37 WIB

Bagi Korea Utara, program nuklirnya merupakan cara diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat mengarah pada langkah negosiasi. Bahkan, Korea Utara menjadikan nuklir sebagai suatu alat penjamin keamanan rejimnya. Presiden George W. Bush menilai, bahwa tindakan Korut itu "secara kategoris tidak bisa diterima". Nuklir merupakan sebuah "ancaman" besar terhadap perdamaian dan stabilitas masyarakat internasional, serta aturan *Non-Proliferasi Nuclear (NPT)*. Dewan Keamanan (DK) PBB pun langsung bergerak cepat untuk mengadakan pertemuan darurat menyikapi perkembangan terbaru dari Korea Utara tersebut. PBB telah mengadakan pertemuan di New York, dan akan bekerja erat dengan mitra-mitranya untuk mengajukan tanggapan masyarakat internasional.

Meskipun pada awalnya, tujuan penegembangan reaktor nuklir di Korut ditujukan untuk penelitian. Namun seiring dengan berkembangnya dinamika politik internasional, maka Korea Utara pun menggunakan teknologi nuklir yang dimilikinya sebagai alat diplomasi, yakni berupa sebuah bentuk diplomasi koersif dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya. Jadi dapat kita lihat bahwa kepentingan nasional Korea Utara

atau tujuannya dengan memiliki nuklir yaitu:

1. Menjaga keamanan rejim Korea Utara, karena pada umumnya Pyongyang menganggap Washington sebagai ancaman utama di kawasan Asia Timur. Amerika Serikat pun akhirnya mengawasi Korea Utara sebagai negara pendukung teroris.
2. Dengan kepemilikan senjata nuklir, Korea Utara akan memiliki posisi unggul dalam negosiasi di dalam percaturan internasional, terutama dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Keamanan rejim bisa Korea Utara dicapai sempurna melalui perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat.
3. Memenuhi kebutuhan sumber daya negaranya, dengan adanya nuklir yang dimilikinya maka ketika ia diminta untuk menutupnya dan menyetujuinya, Korut akan diberikan imbalan berupa pasokan solar yang sangat banyak ataupun pencabutan sanksi-sanksi ekonomi

yang pernah diberikan kepadanya.

Korut selalu ingin bernegosiasi langsung dengan AS dan bukannya Korea Selatan, yang dianggap hanya negara boneka bentukan AS. Dengan bernegosiasi langsung *Vis-à-vis* Amerika Serikat, Korea Utara memberikan sinyal pada dunia bahwa dirinya adalah lawan yang sepadan dengan Amerika Serikat. Gabungan dari militer, ekonomi dan politik ini membuat Korea Utara sangat unik. Biasanya negara-negara mengembangkan senjata nuklir dengan sangat rahasia untuk menghindari intervensi luar. Namun rejim Korea Utara melakukan hal yang sebaliknya dengan mengakui secara terang-terangan keinginan mereka untuk menjadi negara nuklir. Beberapa pengamat menyebut perilaku Korea Utara sebagai eksibisionis atom (*atomic exhibionist*). Dengan menunjukkan pada dunia bahwa Korea Utara sangat berbahaya, maka Korea Utara berharap dapat memeras lebih banyak konsesi dari dunia internasional.

Untuk menghadapi tindakan Korea Utara yang dilihat sudah sangat mengganggu ketentraman keamanan baik itu di kawasan regional maupun di kawasan internasional, maka sudah seharusnya seluruh masyarakat internasional bekerjasama untuk memecahkan permasalahan yang

cukup mengusik ini. Terutama negara-negara yang memiliki hubungan yang cukup potensial terhadap Korea Utara, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Cina. Negara-negara ini harus lebih serius dalam menemukan solusi-solusi atau upaya-upaya dalam menghentikan pengembangan senjata nuklir yang dimiliki Korea Utara. Setiap tindakan yang diambil untuk menghadapi Korea Utara pun harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu agar tidak meningkatkan ketegangan yang lebih memicu untuk berbuat hal-hal yang nekat dan mengancam perdamaian dunia.

PENUTUP

Korea Utara adalah sebuah negara yang terletak berdekatan dengan negara-negara besar seperti, Amerika Serikat, Jepang, Cina, juga Uni Sovyet. Berdasarkan letaknya yang strategis di Kawasan Asia Timur, wilayah Semenanjung Korea menjadi rawan konflik. Dalam sejarahnya, Semenanjung Korea merupakan wilayah bekas jajahan Jepang, yang sebelumnya telah muncul dan berdiri kerajaan-kerajaan besar

seperti, kerajaan Koryo, Choson dan Silla.

Pada awalnya Korea Utara adalah tergabung dengan wilayah Korea Selatan, namun karena terjadinya perselisihan antara keduanya, akhirnya berimbas pada terjadinya perang saudara antar Korea di Semenanjung Korea. Pemisahan Semenanjung Korea menjadi semakin tegang sehubungan dengan terjadinya peristiwa Perang Dingin yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet selama tiga tahun. Namun selama terjadinya Perang Dingin (*cold war*), kedua Korea bersedia untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata pada bulan Juli 1953 dan sekaligus mengakhiri perang saudara yang selama ini terjadi. Dampak dari perang saudara itu sendiri berupa kesengsaraan, sekaligus menyebabkan masyarakat antara kedua Korea menjadi saling mencurigai. Sehingga dari kasus itulah menyebabkan terjadinya pertentangan dan ketegangan antar kedua wilayah Korea hingga sampai saat ini.

Korea Utara termasuk dalam kriteria negara miskin. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sepanjang tahun 1990-an Korea Utara mengalami berbagai macam kesulitan dalam menyeimbangkan perekonomian negaranya yang pada akhirnya menggolongkan Korea Utara sebagai negara miskin. Kemiskinan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; semakin menurunnya perekonomian negara dengan

hilangnya strategi perdagangan dengan kesatuan Soviet dan ketidakmampuan Korea Utara untuk mengimpor barang-barang yang mampu menampung industri negaranya. Dampaknya, Korea Utara mengalami kemerosotan ekonomi secara drastis. Selain itu, faktor pendidikan menjadi semakin rendah, faktor kesehatan yang tidak memadai, serta munculnya bencana besar seperti banjir yang diikuti kemarau dahsyat selama beberapa tahun, sejak tahun 1997. Semua faktor itulah yang menjadi pendukung lemahnya perekonomian Korea Utara yang berimbas pada krisis yang berdampak pada permasalahan kelaparan, kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi dan naiknya angka kriminalitas.

Langkah yang ditempuh pemerintah Korea Utara adalah dengan berupaya membuat swasembada pangan dan melakukan pembangunan berbagai industri yang didasarkan atas sumber alam dan perdagangannya dengan Uni Soviet, Cina, serta negara-negara komunis lainnya. Pemimpin Korea Utara juga menasionalisasikan seluruh lahan dan industri dalam negerinya dengan menghapus kepemilikan lahan pertanian secara pribadi dengan pertanian

kollektif. Selain itu, dari segi pertambangan dan industri pemerintah juga mengembangkan batu bara, biji besi, timbel, dan seng sebagai mineral utamanya. Mineral ini kemudian digunakan untuk menghasilkan baja, mesin, pupuk, bahan kimia yang diperlukan pemerintah untuk memodernisasi angkatan bersenjata, pertanian, dan industri negara.

Kini Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia atas pengembangan program nuklirnya. Setelah mengambil langkah swasembada pangan dan nasionalisasi seluruh lahan dan industri, Korea Utara kemudian bergeliat mengembangkan industri nuklir sebagai upaya memodernisasi persenjataan militernya, meskipun awalnya bertujuan untuk tujuan damai. Dalam konteks nuklir, Korea Utara mempunyai peran dalam menempatkan nuklir sebagai kepentingan dalam permasalahan sistem politik luar negeri negaranya. Dalam konteks tersebut, senjata nuklir kemudian diakui memiliki kelebihan ekstra dibanding senjata konvensional lainnya. Terdapat sejumlah faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan ketertarikan sebuah negara terhadap persenjataan nuklir. Namun, dalam konteks Korea Utara akan digunakan dua faktor untuk menjelaskan ketertarikan tersebut yaitu, kapitalis kekuatan militer konvensional Korea Utara yang rendah dan kepentingan politis.

Meskipun secara militer Korea Utara tergolong dalam jajaran lima negara penghasil senjata terbesar namun dengan kemampuan ekonomi yang lemah akan menunjang pada melemahnya sistem militer Korea Utara, sedangkan dalam permasalahan kepentingan politik Korea Utara berupaya untuk menciptakan stabilitas negara menjadi lebih baik. Nuklir diandalkan memiliki kemampuan sebagai senjata untuk meningkatkan posisi tawar Korea Utara dalam percaturan Internasional. Mencermati hal-hal tersebut, uji coba nuklir bisa dimaknai sebagai bagian strategi penguatan kemampuan politik luar negeri Korea Utara yang juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar politiknya dalam percaturan internasional. Hal ini bisa kita telusuri dari realitas bahwa Korea Utara menghadapi implikasi politik dan ekonomi akibat perang Korea dan hubungan yang terisolasi dari dunia internasional.

Pada situasi ini fokus perhatian Korea Utara adalah dengan penggalangan kekuatan nasionalnya (militer). Ini merupakan pilihan rasional yang diambil dalam memperkuat posisi tawar untuk memperoleh kompensasi politik ekonomi

yang dibutuhkan. Harapannya, dengan dihentikannya program nuklirnya, Korea Utara akan mendapatkan sejumlah bantuan dalam bidang finansial dan bidang-bidang yang lain dari Amerika dan sekutunya. Sementara dalam hal politis lebih dilandasi pada kepentingan untuk menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) dilevel internasional.

Senjata nuklir digunakan sebagai sarana untuk menekan komunitas internasional agar melibatkan Korea Utara dalam percaturan global. Selain itu, Korea Utara ingin memajukan kepentingan-kepentingan lainnya, terutama pencabutan sanksi keuangan internasional yang diterimanya. Dalam sistem internasional yang anarkis, stabilitas akan dicapai melalui perimbangan dengan kekuatan (*balance of power*). Perimbangan ini bersifat dinamis yaitu, setiap saat dapat berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang berkembang baik melalui diplomasi ataupun perang, baik ditingkat nasional maupun internasional.

Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara baik menggunakan sanksi, bantuan dan kemanusiaan tidak pernah memberikan hasil sesuai tujuan. Apalagi sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat ditentang oleh Jepang, Korea Selatan dan Cina. Pemberian sanksi ini membuat *kollaps* ekonomi Korea Utara, sehingga

ditakutkan menyebabkan mengalirnya puluhan ribu pengungsi ke negara-negara sekitar Korea Utara. Akhirnya, langkah yang diambil adalah dengan upaya diplomasi yang menghasilkan *Agreed Framework* 1994, dan kemudian berakhir dengan pengingkaran Pyongyang atas Gedung Putih pada terobosan-terobosan diplomasi lanjutan mulai *Three Ways Talk* hingga *Six Party Talk* dengan melibatkan Korea Selatan, Cina, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia. Korea Utara juga akhirnya secara terang-terangan menarik diri dari perjanjian NPT mengusir tim monitoring PBB, melepas segel kamera pengawasan nuklirnya, bahkan melanjutkan proses pengayaan nuklirnya pada bulan Oktober 2002.

Paling tidak, Korea Utara telah menjadikan nuklir sebagai instrumen diplomasi terhadap dunia internasional demi meraih kepentingan nasionalnya. Alasan Korea Utara menggunakan nuklir sebagai alat diplomasi adalah *pertama*, alasan *regim survive*. Korea Utara menganggap efek *deterrent* kepemilikan kemampuan serang nuklir akan menggaransi kelangsungan hidup rejim Pyongyang yang tidak lain adalah rejim komunis yang

masih ingin eksis di belahan bumi.

Kedua, alasan ekonomi. Korut menggunakan program nuklirnya sebagai instrumen diplomasi untuk "memeras" negara-negara di sekitarnya dalam bantuan ekonomi. Adapun konsesi yang diberikan Korea Utara adalah seperti penghentian sementara program nuklirnya atau ijin inspeksi IAEA dilakukan dengan imbalan bantuan makanan dan bahan bakar dari Cina dan Korea Selatan, serta pembangunan reaktor nuklir sipil di Korea Utara oleh pihak Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara bahkan meminta konsesi untuk sekedar hadir di meja perundingan, sebagaimana syarat Pyongyang agar Washington mencairkan rekening 25 juta dollar miliknya yang dibekukan di Makau tahun 2005 sebelum kembali ke meja perundingan.

Ketiga, alasan keamanan. Bagi Korea Utara, program nuklirnya merupakan cara diplomasi yang efektif untuk membawa Amerika Serikat mengarah pada langkah negosiasi. Meskipun pada awalnya, tujuan penegembangan reaktor nuklir di Korea Utara ditujukan untuk penelitian. Namun seiring dengan berkembangnya dinamika politik internasional, Korea Utara pun menggunakan teknologi nuklir yang dimilikinya sebagai sebuah bentuk diplomasi koersif dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya

PUSTAKA

Azwar, Syaifuddin *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998

Bank of Korea, *Seoul and Korea Trade-Investment Promotion Agency*, Seoul (as cited in the Economists Intelligence Unit 2003 Country Report)

Chandra, Prakash *International Politics*, New Dehli, Vikas Publishing, 1982

Didik T. A., *Diplomasi Kebudayaan Indonesia Melalui Euro-Asia World Heritage Cities Conference and Expo (WHCCE) Solo 2008*, (Skripsi), Departemen Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2009

Ecker, Carter. J., *Korea Old and New a History*, Ilchokak, Seoul, 1990

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

Kerr, Paul *Arms Control Association Fact Sheet: Cronology of U.S-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy*, Analisis, Washington D.C., 2003

Langton, Chistopher, *The Military Balance: The*

- International Institute for Strategic Studies 2003/ 2004*, London, Oxford University Press, 2003
- Mas'ood, Mohtar *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1999
- _____ dan Yang S. Yoon, *Memahami Politik Korea*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002
- Nahm, Andrew C., *History of The Korean People: Korea Tradition and Transformation*, Hollym International Corp, Seoul, 2002
- Nicolson, Harold *Diplomacy*, Oxford University Press, London, 1960
- Noland, Markus *The Economic Implications of a North Korea Nuclear Test*, Asian Policy, Washington D.C., 2006
- R. Bogdan and S.J. Tylor (eds), *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, Wiley, 1975
- Roy, S.L., *Diplomacy*, Penerjemah Harwanto dan Mirsawi, Rajawali Press, Jakarta, 1991
- Sarlito, Wirawan, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000
- Seung Yoon Yang dan Mohtar Mas'ood, *Sejarah Korea Sejak Awal Hingga Masa Kontemporer*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003
- Spring, Baker, *Missile Defense Testing Needed To Meet North Korea Threat*, Washington, The Heritage Foundation Executive Memorandum, 1999
- Sukma, Rizal. "Dua Korea dan Proses Perdamaian di Asia Timur," dalam Masalah Intra-Kawasan dan Prospek Ekonomi Indonesia, (Jurnal Analisis CSIS), tahun XXI, No.3, Mei – Juni 1992
- Wanandi, Jusuf, *Masalah Keamanan Asia*, (Jurnal) *Central for Strategic and Internasional Studies (CSIS)*, Jakarta, 1990
- Warsito, Tulus *Demokratisasi Pasca Kritis 1997 Korea Selatan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005
- _____, *Teori-teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998

MEDIA CETAK:

Harian *Suara Pembaruan*,
edisi 26 Pebruari 2004

Harian *Kompas* edisi 29
Pebruari 2004

Harian *Media Indonesia*,
edisi 3 Maret 2003

Harian *Republika*, edisi 14
April 2009

Harian *Suara Karya*, edisi
24 April 2003

Harian *Suara Pembaruan*
edisi 29 April 2003

Harian *Kompas*, edisi 26
April 2003

Harian *Suara*
Pembaharuan, edisi 25 April 2003

Harian *Media Indonesia*,
edisi 28 Agustus 2003

Koran *Tempo*, edisi 28 April
2003

Koran *Tempo*, edisi 2
Agustus 2003

Koran *Tempo*, edisi 30
Agustus 2003

Koran *Tempo*, edisi 18
Oktober 2002

Koran *Tempo*, edisi
13 Nopember 2003

INTERNET:

<http://www.koreanherald.co.kr/SITE/data>

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea#Birth_of_North_Korea,

<http://www.jurnalhukum.blogspot.com>

http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara

http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Il_Sung

http://www.ifri.org/files/Secure_defense/Deterrence_Today_Dunn_2007.pdf

<http://www.kimsoft.com/korea/nk-nukes.htm>

<http://www.kompas.com>

http://www.cbsnews.com/elements/2003/01/10/in_depth_world/timelines536079.shtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_party_talks

[http://www.mpfa.go.jp/re
gion/asia-
pasi/n_korea/6party0402.html](http://www.mpfa.go.jp/re
gion/asia-
pasi/n_korea/6party0402.html)

[http://www.nautilus.org/fo
ra/security/0426A_Koh.html](http://www.nautilus.org/fo
ra/security/0426A_Koh.html)

[http://asiacalling.kbr68h.c
om/index.php/archieves/640](http://asiacalling.kbr68h.c
om/index.php/archieves/640)

[http://www.csis.or.id/schol
ars_opinion_view.asp?op_id=44&t
ab=1](http://www.csis.or.id/schol
ars_opinion_view.asp?op_id=44&t
ab=1)

[http://en.wikipedia.org/wi
ki/North_Korea#Birth_of_North_K
orea](http://en.wikipedia.org/wi
ki/North_Korea#Birth_of_North_K
orea)

